



Judul : Disiplin Lunasi Utang - Pekerja Migran Layak Dapat KUR
Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Anggota Komisi IX DPR Ketut Kariyasa mendorong pemberian kemudahan penyaluran kredit bagi para calon pekerja migran Indonesia. Hal itu merupakan amanat dari perundang-undangan, agar setiap calon pekerja dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen.

Disiplin Lunasi Utang **Pekerja Migran Layak Dapat KUR**

“PIHAK bank tidak perlu takut ada macet jika menyalurkan kredit ke calon pekerja migran. Sebab, jika terjadi kemacetan, sudah ada jaminan dari Askrindo (PT Asuransi Kredit Indonesia Persero),” kata Ketut, kemarin.

Ketut bilang, kejadian kredit macet di kalangan pekerja migran sangat jarang terjadi. Bahkan, mereka termasuk dalam golongan pekerja yang sangat disiplin mengembalikan kredit pinjaman dari Pemerintah.

“Tidak ada yang sampai tidak nyicil,” sambung politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Untuk itu, dia meminta agar bank-bank di Bali dapat menjadi pelopor penyaluran kredit

untuk para calon pekerja migran Indonesia.

“Tahun depan kami mohon biar Bali ini menjadi pelopor agar bank-bank Pemerintah maupun bank daerah di Bali sudah bisa menyalurkan,” pintanya.

Senada, anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta meminta Pemerintah menyiapkan insentif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pariwisata. Sebab, situasi pariwisata di Bali saat ini masih memburuk. Dikhawatirkan, akan banyak pelaku wisata di Bali terancam bangkrut.

Kekhawatiran Nyoman ini merunut data kunjungan wisatawan

ke Bali pada 2022 yang masih berada di angka stagnan. Di Januari ini saja, tercatat jumlah wisatawan ke Bali 144.744 jiwa, sementara di Februari turun signifikan hingga 18.455 jiwa.

Angka wisatawan ini sangat kontras di periode yang sama sebelum pandemi. Pada Januari-Februasi 2019, tercatat wisatawan yang masuk ke Bali rata-rata mencapai 1,2 juta orang.

“Jadi, kedatangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini masih sangat jauh dari jumlah idealnya,” kata Nyoman.

Dia waswas akan banyak pengusaha pariwisata dan pelaku UMKM mengalami kredit macet.

Perekonomian di Bali tak kunjung membaik, kendati sudah banyak kebijakan memudahkan wisatawan lokal dan asing masuk ke Bali.

Kini, harapan besar mereka ada di Pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan relaksasi bagi para debitur perbankan.

Dia merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2021 tentang perpanjangan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak Covid-19. Relaksasi ini berakhir sampai 31 Maret 2023.

Selanjutnya, pembayaran kredit pokok dan bunga akan terakumulasi dengan pembayaran

yang normal.

“Tentu hal ini akan sangat menyulitkan. Kemampuan membayar makin tidak ada. Penambahan modal tidak dimungkinkan karena terbentur dengan berbagai peraturan,” katanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui Bank Himbara membantu berbagai program penyelamatan ekonomi masyarakat di Pulau Dewata ini. Salah satunya dengan memperpanjang masa relaksasi dan restrukturisasi kredit.

“Berikan seringan-ringannya, bahkan langkah pemutihan, terutama untuk UMKM,” katanya. ■ KAL